



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berikut adalah Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan tahun 2025 dan tahun 2024 (yang berlaku mulai dan atau untuk tahun 2025) terkait tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset :

No.	Nomor , Tanggal dan tahun penetapan	Jenis	Tentang	Status
1	Nomor 11 Tanggal 31 Desember Tahun 2024	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Berlaku Mulai 1 Januari 2025
2	Nomor 52 Tanggal 9 September 2024	Peraturan Gubernur	Pengelolaan Barang Persediaan	Berlaku Mulai 1 Januari 2025
3	Nomor 83 Tanggal 6 Desember 2024	Peraturan Gubernur	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Berlaku mulai 5 Januari 2025 dan telah diubah sebagian
4	Nomor 112 Tanggal 31 Desember Tahun 2024	Peraturan Gubernur	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Berlaku
5	Nomor 1 Tanggal 3 Januari 2025	Peraturan Gubernur	Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Berlaku

No.	Nomor , Tanggal dan tahun penetapan	Jenis	Tentang	Status
6	Nomor 456/KEP/2024 Tanggal 29 November 2024	Keputusan Gubernur	Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025	Berlaku
7	Nomor 507/KEP/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Keputusan Gubernur	Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Berlaku Mulai 5 Januari 2025 sd 31 Desember 2025
8	Nomor 37 Tanggal 20 Januari 2025	Keputusan Gubernur	Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Diubah
9	Nomor 54 Tanggal 4 Februari 2025	Keputusan Gubernur	Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024	Berlaku
10	Nomor 55 Tanggal 4 Februari 2025	Keputusan Gubernur	Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2025	Berlaku
11	Nomor 122 Tanggal 9 April 2025	Keputusan Gubernur	Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Berlaku
12	Nomor 143 Tanggal 5 Mei 2025	Keputusan Gubernur	Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Berlaku
13	Nomor 245 Tanggal 8 Juli 2025	Keputusan Gubernur	Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 456/KEP/2024 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025	Berlaku
14	Nomor 274 Tanggal 30 Juli 2025	Keputusan Gubernur	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025	Berlaku
15	Nomor 283 Tanggal 5 Agustus 2025	Keputusan Gubernur	Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota	Berlaku

No.	Nomor , Tanggal dan tahun penetapan	Jenis	Tentang	Status
16	Nomor 113/SEKDA/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2025	Keputusan Sekretaris Daerah	Metode Perhitungan Nilai Barang Persediaan	Berlaku Mulai 1 Januari 2025
17	Nomor B/00.8.3.4/1587/B2 Tanggal 10 Februari 2025	Keputusan Kepala BPKA DIY	Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial	Berlaku
	Nomor B.900.1.1.2/1877/B2 Tanggal 17 Februari 2025	Keputusan Kepala BPKA DIY	Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026	Berlaku
	Nomor B/800.1.10/1916/B2 Tanggal 18 Februari 2025	Keputusan Kepala BPKA DIY	Penilaian Risiko pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Berlaku
	Nomor B/00.8.3.3/2218/B2 Tanggal 15 Februari 2025	Keputusan Kepala BPKA DIY	Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Berlaku
	Nomor B/900.1.1.2/4002/B2 Tanggal 21 April 2025	Keputusan Kepala BPKA DIY	Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	Berlaku
	Nomor B/900.1.13.1/7114/B2 Tanggal 15 Juli 2025	Keputusan Kepala BPKA DIY	Pemberian keringanan atau Menolak atas Permohonan Wajib Pajak Untuk Mendapat Keringanan Denda Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Berlaku